



Kementerian PPN/
Bappenas



ASEAN
INDONESIA
2023

Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Transformasi Daerah Menuju Kutai Kartanegara Emas dan Indonesia Emas 2045

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek
Infrastruktur Prioritas Nasional



Kementerian PPN/ Bappenas

Tenggarong, 12 September 2023



Daftar Riwayat Hidup



Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 Januarl 1965
Golongan : IVD
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195
E-mail: sumedi@bappenas.go.id dan sumediam@gmail.com

PENDIDIKAN

1. *Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Thnik Thank)*. Harvard Kennedy School Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
2. *Leadership in Succession and Talent Management*. Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education, Australia. 27 Okt – 1 Nov 2016
3. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
4. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
5. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
6. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
7. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

PEKERJAAN

1. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Bappenas, Juli 2022-sekarang
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas, Sept 2020-Juli 2022
3. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas, Jan 2019-Sept 2020
4. Direktur Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas. Sept 2016-Januari 2019
5. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas. Januari 2006-September 2016
6. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
7. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas. Des. 2000-Mei 2004
8. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Mei 1999 –Desember 2000
9. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Maret 1994 –Januari 1997
10. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, Bappenas 1991-Maret 1994



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PESAN UTAMA

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju Indonesia Emas 2045.

Megatren dan Tantangan Pembangunan Daerah:

Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Indonesia Emas 2045:

Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan Infrastruktur, Kesinambungan Pembangunan.

Benchmarking Pembangunan Daerah:

Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman), Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan)

Transformasi Kabupaten Kukar:

Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (*value chain*)

Penerapan Ekonomi Sirkular:

Pengelolaan ekonomi dengan menerapkan praktik daur ulang 5R untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara:

Kota Dunia untuk Semua, Tahapan, Prinsip dan Indikator Kinerja Utama, Kota hutan, Kota Sponge, dan Kota Cerdas, Super hub Ekonomi dan Daerah Mitra IKN

Kebijakan Pembangunan Perkotaan:

Isu Strategis, Manajemen Risiko Bencana, Prinsip, Pendekatan Kebijakan, Tata Kelola dan Pengendalian Pembangunan.

Pengembangan Infrastruktur Daerah:

Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur Berkelanjutan dan Tata Kelola Infrastruktur

Revitalisasi Kecamatan:

Kecamatan sebagai Pusat, Data, Informasi, dan Pengetahuan; Pusat Pelayanan; Pusat Pemberdayaan; Pusat Inovasi dan Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:

Membangun basis keunggulan komparatif, kompetitif dan kolaboratif; Agenda Kerjasama Multipihak.



Agenda Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju Indonesia Emas 2045.

Identifikasi Isu Strategis, Tantangan dan Skenario:

Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Penjabaran Visi Indonesia Emas 2045:

Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan Infrastruktur, Kesinambungan Pembangunan.

Pembelajaran *Best Practices* Pembangunan:

Konsep dan Strategi Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman), serta Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan)

Konsep dan Arah Transformasi Daerah:

Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (*value chain*)

Penerapan Ekonomi Sirkular:

Pengembangan Konsep dan Arah Pengembangan Ekonomi Sirkuler untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Penyiapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara:

Standar, Norma, Proses dan Kinerja Kota Dunia dalam Pelayanan, Tata Kelola dan Kinerja pembangunan

Kebijakan Pembangunan Wilayah:

Review Konsep, Arah Kebijakan dan Masterplan Pembangunan Wilayah.

Penyediaan Infrastruktur Daerah:

Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur Berkelanjutan dan Tata Kelola Infrastruktur

Revitalisasi Kecamatan:

Pedoman dan Master Plan Kecamatan sebagai Pusat, Data, Informasi, dan Pengetahuan; Pelayanan; Pemberdayaan; Inovasi dan Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:

Penyiapan Pola, Skema dan Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaboratif Multipihak untuk Membangun basis keunggulan komparatif, kompetitif dan kolaboratif.



Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045



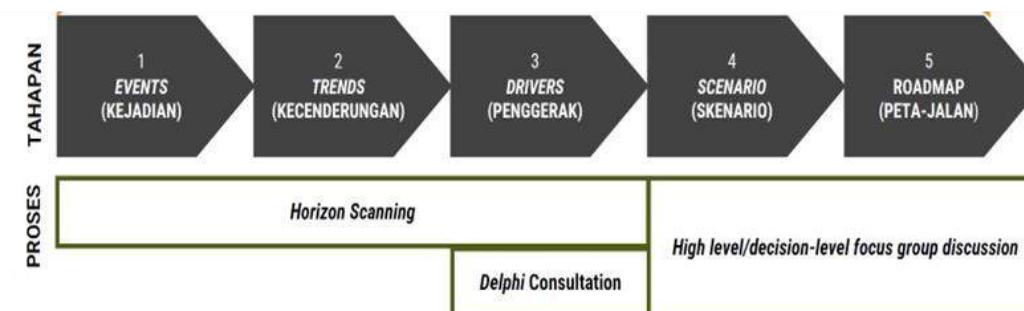
BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menyiapkan dan Membentuk Masa Depan

Pendekatan dan Metode *Foresight*



TAHAPAN METODA FORESIGHT:



**MASA DEPAN
DIBENTUK OLEH KITA**

...bukan diprediksi, bukan diramalkan...

Mengantisipasi Perubahan
Merancang Perubahan
Beradaptasi dengan Perubahan

*The future is neither predicted nor forecasted. It is shaped.
Your–our– life is shaped. If not by you, or us, then definitely by others.
(Ian Miles, 2004)*



Kejadian, Kecenderungan dan Penggerak Perubahan Menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Emas 2045

Kejadian (*Events*)

- Ketergantungan komoditas
- Ekspolitasi SDA
- Degradasi Lingkungan
- Perubahan Iklim dan Bencana
- Percepatan Perdagangan dan Investasi

Penggerak Perubahan (*Drivers of Change*)

- SDM Berkualitas, Tangguh dan Adaptif
- Kualitas Pelayanan Publik
- Manajemen SDA dan Lingkungan Berkelanjutan
- Inovasi Desa dan Revitalisasi Kecamatan
- Konektivitas: Infrastruktur dan Digital
- Mitigasi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pembangunan IKN
- Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak

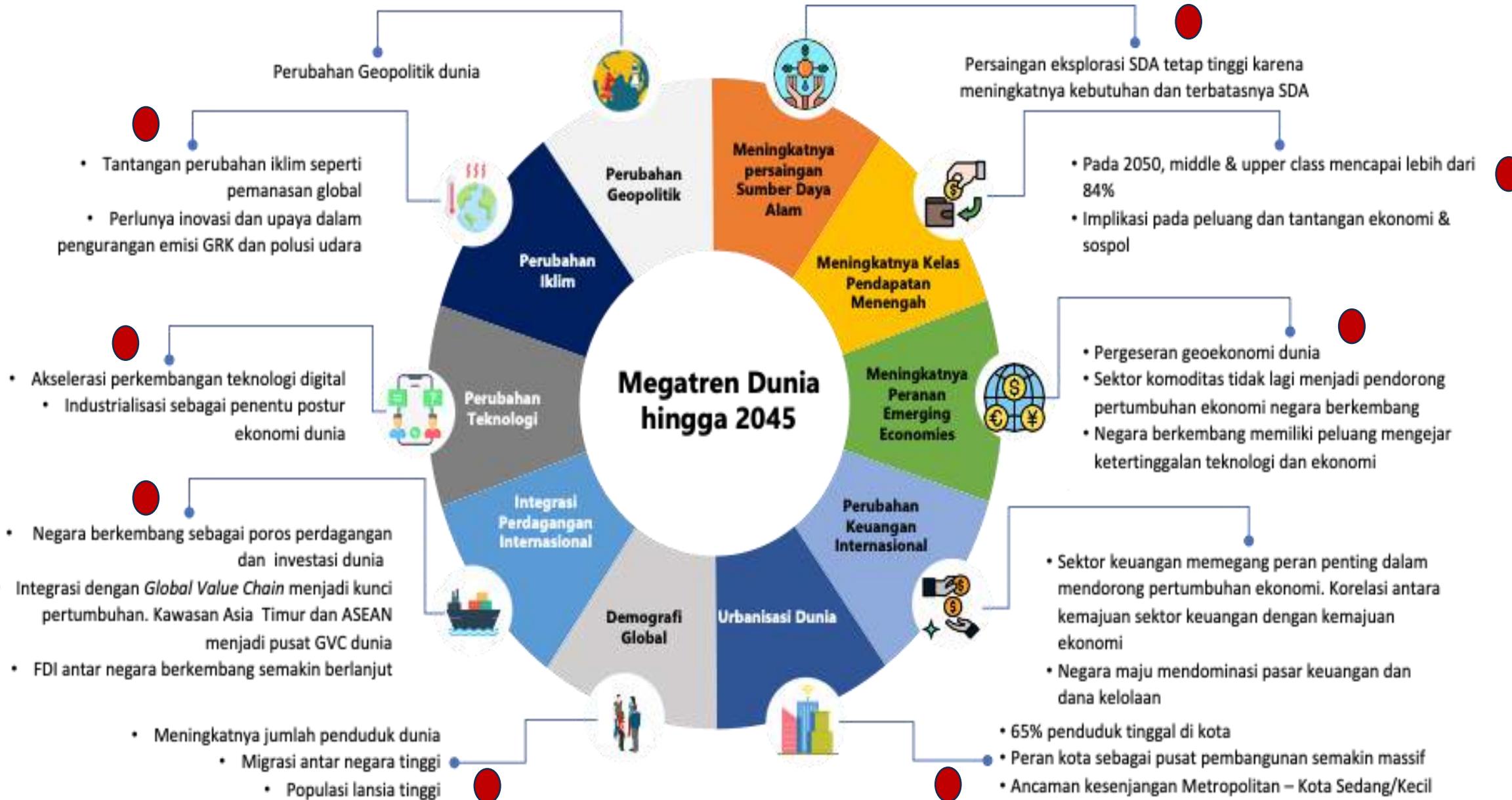
Kecenderungan (*Trends*)

- Demografi: Pertumbuhan dan Migrasi
- Perubahan Perilaku Sosial dan Budaya
- Transportasi dan Mobilitas Tinggi
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Perkembangan Green Economy, Blue Economy dan Circular Economy

Transformasi Sosial, Ekonomi, Ekologi, dan Tata Kelola untuk mendorong akselerasi pembangunan desa, kecamatan dan kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat.



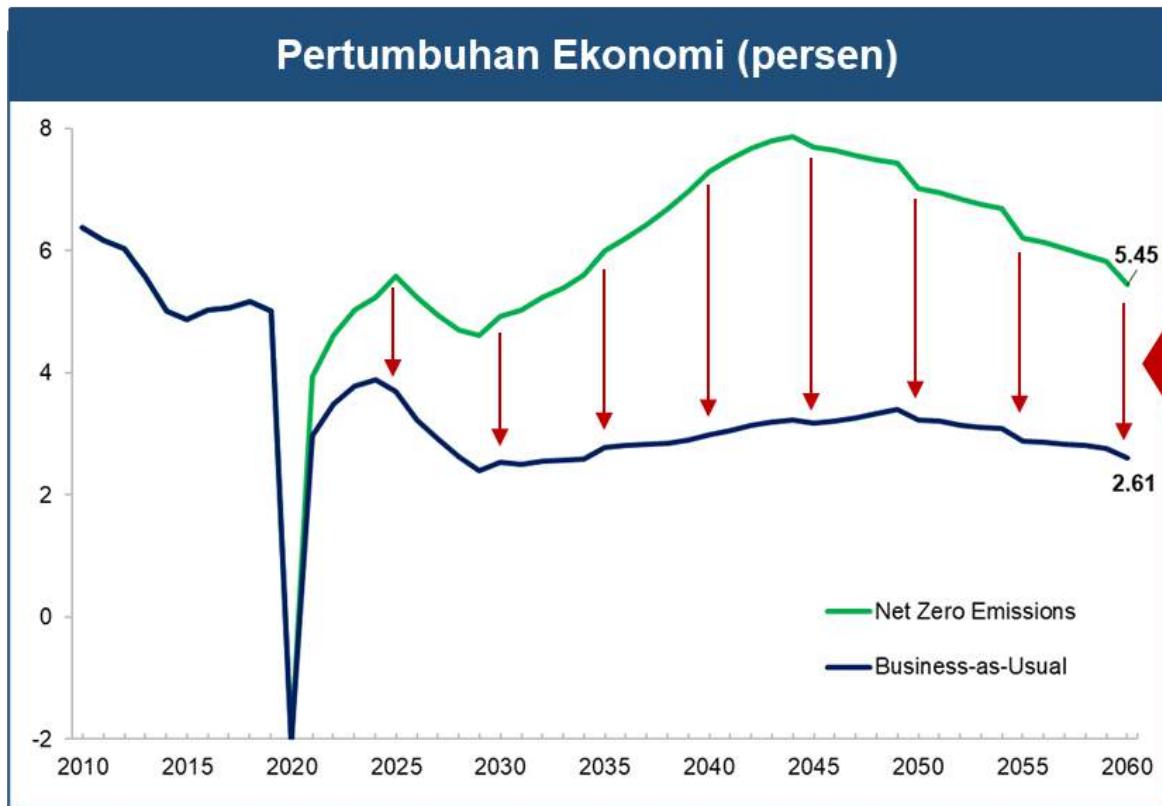
Megatren dan Tantangan Pembangunan





Rancangan RPJPN 2025-2045: Menjaga Kesinambungan Pembangunan

Kebijakan *Business-as-Usual* menyebabkan *Carrying Capacity* akan terus menurun dan berimplikasi pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan



Daya Dukung	Daya Tampung	Penurunan carrying capacity	
		Lahan:	Energi:
		<ul style="list-style-type: none">10 juta hektar lahan hutan akan hilang dari 2025 sampai tahun 2060Lahan pertanian akan terus menurun sampai 7 juta hektarProduktivitas lahan sawah menurun menjadi 7 ton/ha/tahun akibat degradasi tanah	Cadangan minyak dan gas hanya tersisa sekitar 0.3% dan 2% pada tahun 2060
		Emisi: Pada 2060, total emisi meningkat hampir 2x lipat dibandingkan level 2010	Sampah: Kapasitas TPA Indonesia akan penuh sebelum tahun 2028
		Air: Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4.7 juta ton BOD per tahun.	Udara: Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26.5 microgram/hari , atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 microgram/hari)



Visi Indonesia Emas 2045

INDONESIA EMAS 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Negara Nusantara

Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, ketahanan nasional, budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

Berdaulat

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian, ketahanan, dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri dan mengamankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.

Maju

Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil.

Berkelanjutan

Negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Lima Sasaran Utama Visi 2045

01

Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2045 Target
GNI Per Capita (USD)	5.500	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	17,5
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0

02

Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

	2025 Baseline	2045 Target
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	20,6 (2022)	28,5

03

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

	2025 Baseline	2045 Target
Global Power Indeks (peringkat)	34 (2023)	15 besar

04

Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2045 Target
Human Capital Index	0,54 (2022)	0,73

05

Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025 Baseline	2045 Target
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5



Rancangan RPJPN 2025-2045: Sasaran dan Misi (Agenda) Pembangunan

INDONESIA EMAS 2045
Negara Nusantara
Berdaulat, Maju dan
Berkelanjutan

5 Sasaran

1. Pendapatan per kapita **setara dengan negara maju** (sekitar US\$30.300),
2. Kemiskinan menuju **nol persen** dan **ketimpangan** berkurang,
3. Kepemimpinan dan **pengaruh di dunia internasional** meningkat,
4. **Daya saing sumber daya manusia** meningkat
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca **menuju Net Zero Emission.**

8 Misi (Agenda)

Transformasi Indonesia

- Agenda 1: Transformasi Sosial
Agenda 2: Transformasi Ekonomi
Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

- Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

- Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana
Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Agenda 8: Kesinambungan Pembangunan



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rancangan RPJPN 2025-2045: Misi (Agenda) dan Arah Pembangunan

8 Misi (Agenda)

Transformasi Indonesia

- Agenda 1: Transformasi Sosial
- Agenda 2: Transformasi Ekonomi
- Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

- Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
- Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

- Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana
- Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Agenda 8: Kesinambungan Pembangunan

Transformasi Sosial

- 1. Kesehatan untuk Semua
- 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
- 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Transformasi Ekonomi

- 4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- 5. Penerapan Ekonomi Hijau
- 6. Transformasi Digital
- 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

- 9. Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi

- 10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan

- 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
- 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
- 16. Berkatahan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
- 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah

Sarana dan Prasarana

Kesinambungan Pembangunan



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pentahapan Pembangunan 2025-2045



2025-2029
Perkuatan Fondasi Transformasi



- Pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap.
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
- Melanjutkan pembangunan IKN serta pengembangan kota besar dan metropolitan mengacu pembangunan IKN.



2030 - 2034
Akselerasi Transformasi



- Melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya.
- Terwujudnya masyarakat sipil yang partisipatif.
- Akuisisi teknologi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.
- Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pembangunan superhub IKN.
- Pembangunan kota besar dan metropolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi.



2035 - 2039
Ekspansi Global



- Terwujudnya masyarakat sipil yang mandiri.
- Peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara.
- Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
- Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.



2040 - 2045
Perwujudan Indonesia Emas



- Perwujudan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.
- Menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
- Tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
- Sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

KAWASAN BARAT INDONESIA					
	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	5,1	5,3-5,5	5,8-6,6	6,4-7,4	5,8-6,6
Kontribusi*	78,5	76,7	75,3	73,6	71,5



	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	4,7	4,9-5,2	5,4-6,4	6,3-7,6	5,9-7,2
Kontribusi*	22,0	22,2	22,5	22,6	23,0

JAWA

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	5,3	5,5-5,7	5,9-6,7	6,5-7,4	5,7-6,4
Kontribusi*	56,5	54,5	52,8	51,0	48,5

KALIMANTAN

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	4,9	5,8-6,1	6,4-7,3	7,3-9,0	7,3-9,2
Kontribusi*	9,2	9,6	9,9	10,3	11,2

SUMATERA

SULAWESI

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	7,1	7,5-8,0	7,6-9,4	9,0-11,0	7,2-9,0
Kontribusi*	7,0	7,6	7,8	8,2	8,4

MALUKU

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	14,2	11,2-11,6	11,4-13,1	11,3-13,7	8,3-10,1
Kontribusi*	0,7	1,0	1,4	1,9	2,0

PAPUA

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	7,0	6,6-6,9	7,0-7,5	7,3-8,2	6,8-7,9
Kontribusi*	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0

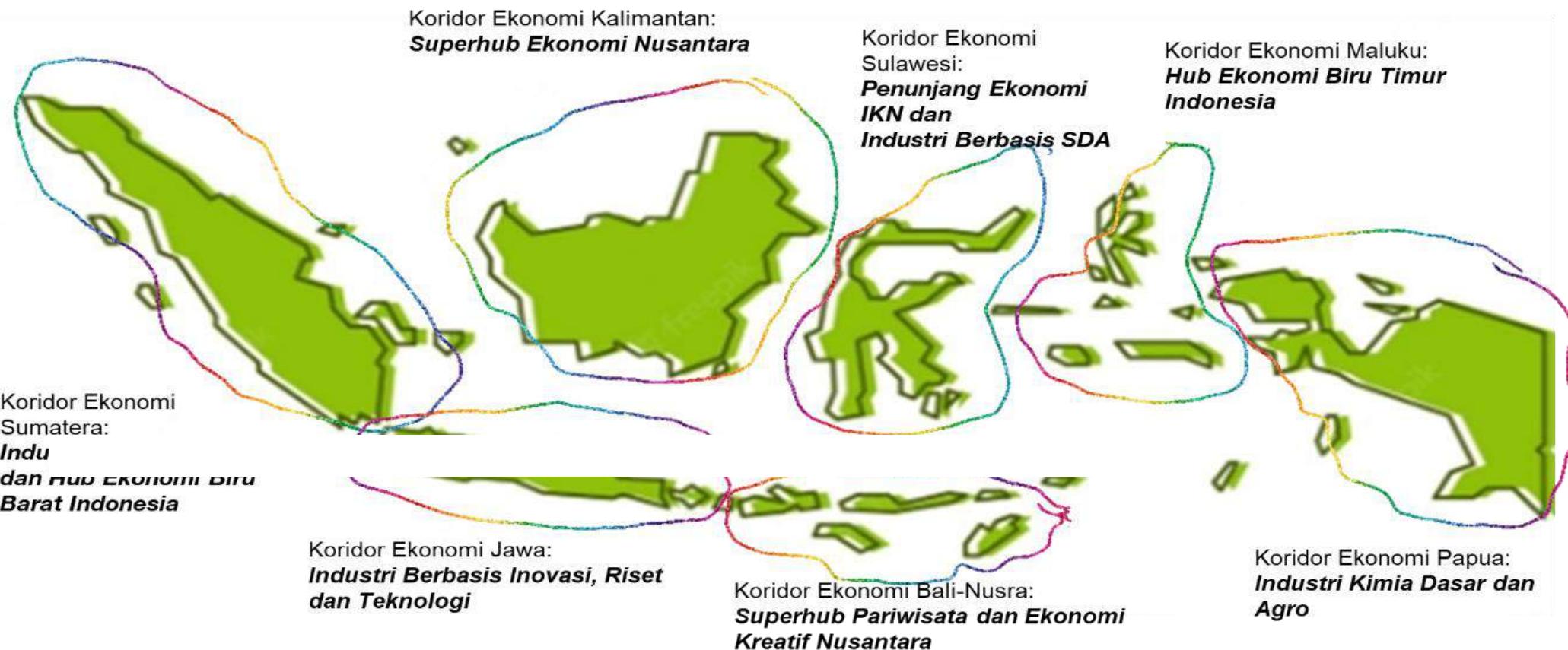
BALI-NUSA TENGGARA

	2022	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2045
Pertumbuhan	5,1	6,4-6,8	7,1-7,7	7,6-8,1	7,5-7,9
Kontribusi*	2,7	3,0	3,2	3,4	3,9



Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah





Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Tata Ruang dan Pertanahan

1. menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah
2. mewujudkan penataan ruang yang berkualitas
3. mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang

Reforma Agraria

1. pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset)
2. perbaikan pengelolaan pertanahan

Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik

1. penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
2. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial

Fokus lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri.
Fokus wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan

Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

1. menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirancang sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jendela budaya nasional Indonesia
2. pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan



Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (a) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (b) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (c) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; (d) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

1. pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif
2. percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan
3. penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan
4. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Perdesaan dan Daerah Afirmasi

1. peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan
2. peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pemanfaatan teknologi
3. pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah
4. pengelolaan lingkungan perdesaan
5. peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal
6. pengaturan dan penataan desa
7. Pengembangan kawasan perdesaan,
8. Pengembangan kawasan transmigrasi
9. Percepatan pembangunan daerah afirmasi yang meliputi kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal



Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara



1. **Pembangunan sumber daya manusia unggul** yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan **peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter**, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan.
2. **Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan** dengan meningkatkan **interaksi antarwilayah**, terutama antara **Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra** sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. **Pembangunan sarana prasarana** untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep **superhub ekonomi** serta meningkatkan **infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital**, serta **pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP**.
4. **Penguatan tata kelola pemerintahan** untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. **Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi** sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.



Benchmarking Pembangunan Kota



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Penataan Ruang Publik di Jepang

... Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman...





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Penataan Ruang Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Dasar Pendidikan di Jepang

... Mandiri, Tanggung Jawab dan Tangguh...





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Seni dan Budaya di Jepang

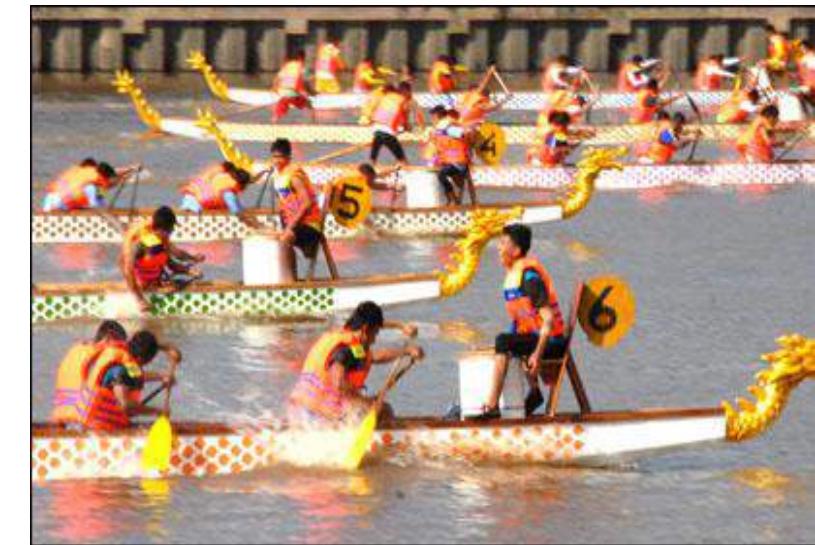
... Atraktif, Partisipatif, dan Inovatif...





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara





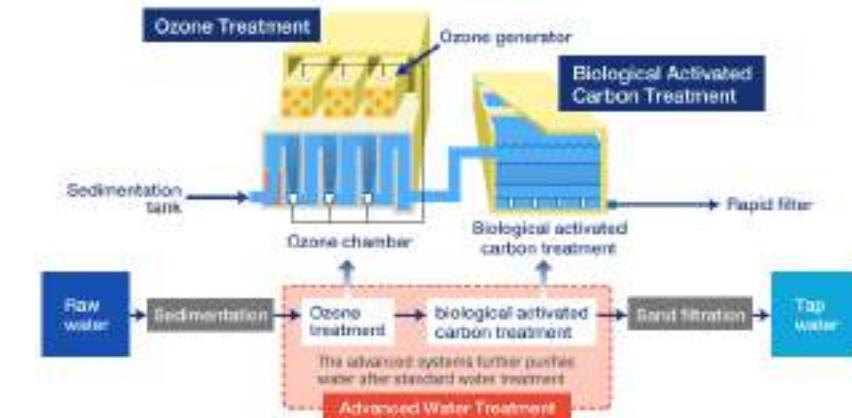
BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Dasar Air Bersih di Jepang

... Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelaanjutan...



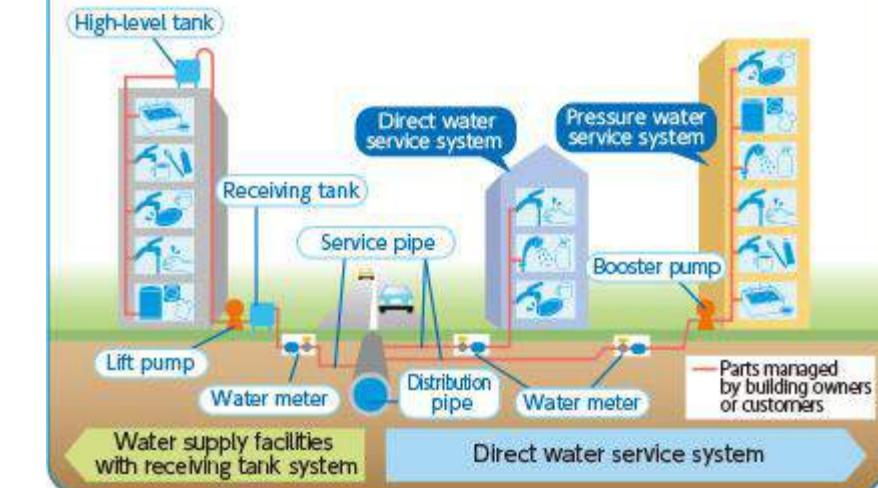
Tokyo Waterworks Advanced Treatment System



© nippon.com



Water supply facilities with receiving tank system and Direct water service system





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara



kaltimkece.id



kaltimkece.id



kaltimkece.id





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengendalian Banjir di Jepang

... Tuntas, Terpadu, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan...





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengendalian Banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Dasar Persampahan di Jepang

... Bersih, Aman, Tertata, Sirkular dan Berkelanjutan...





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Penataan Pusat Perdagangan di Jepang

... Bersih, Aman, Tertata, Interaktif dan Nyaman...





Penataan Pusat Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara

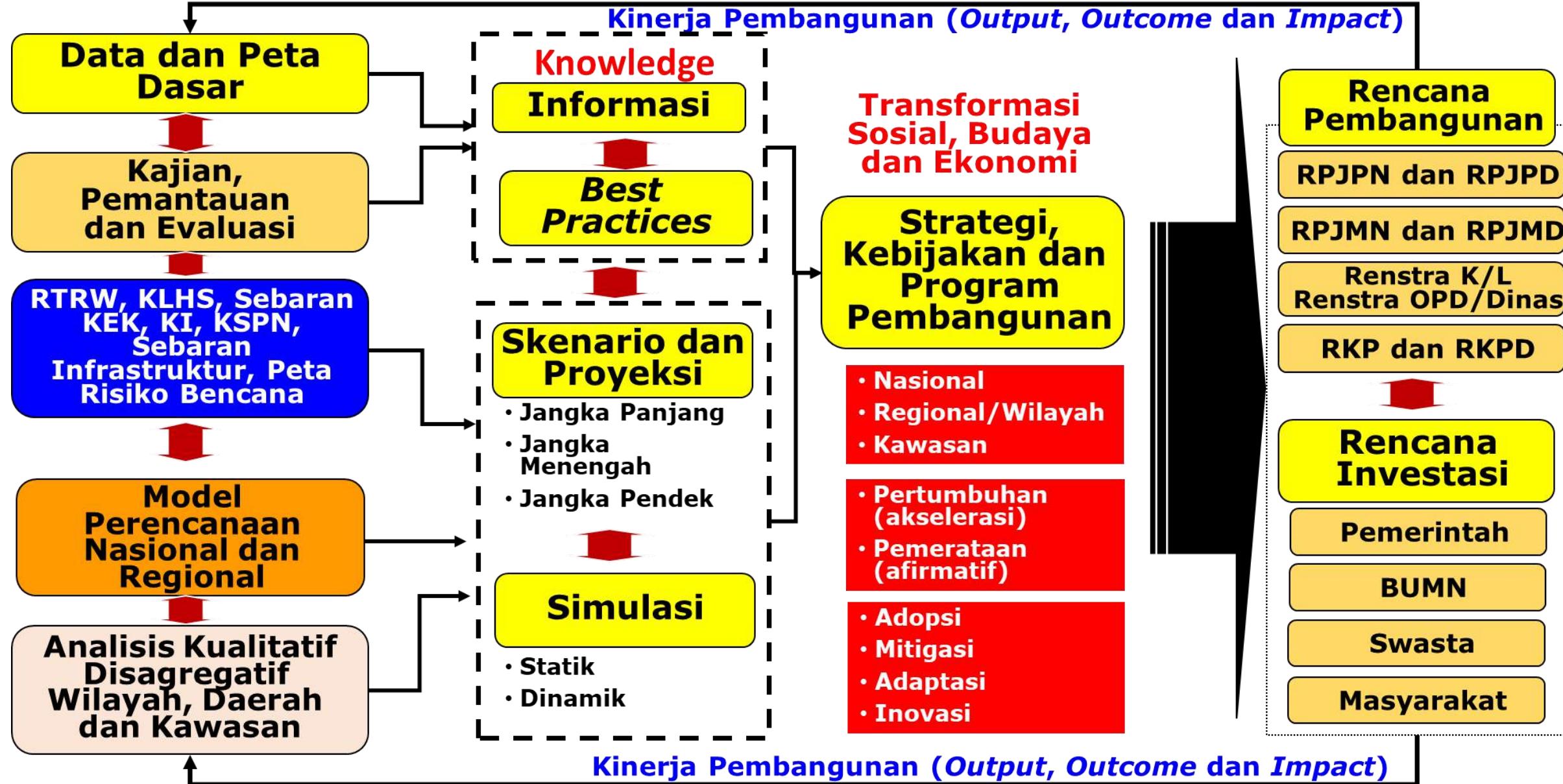




Transformasi Daerah: Kesejahteraan Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular dan Rantai Nilai



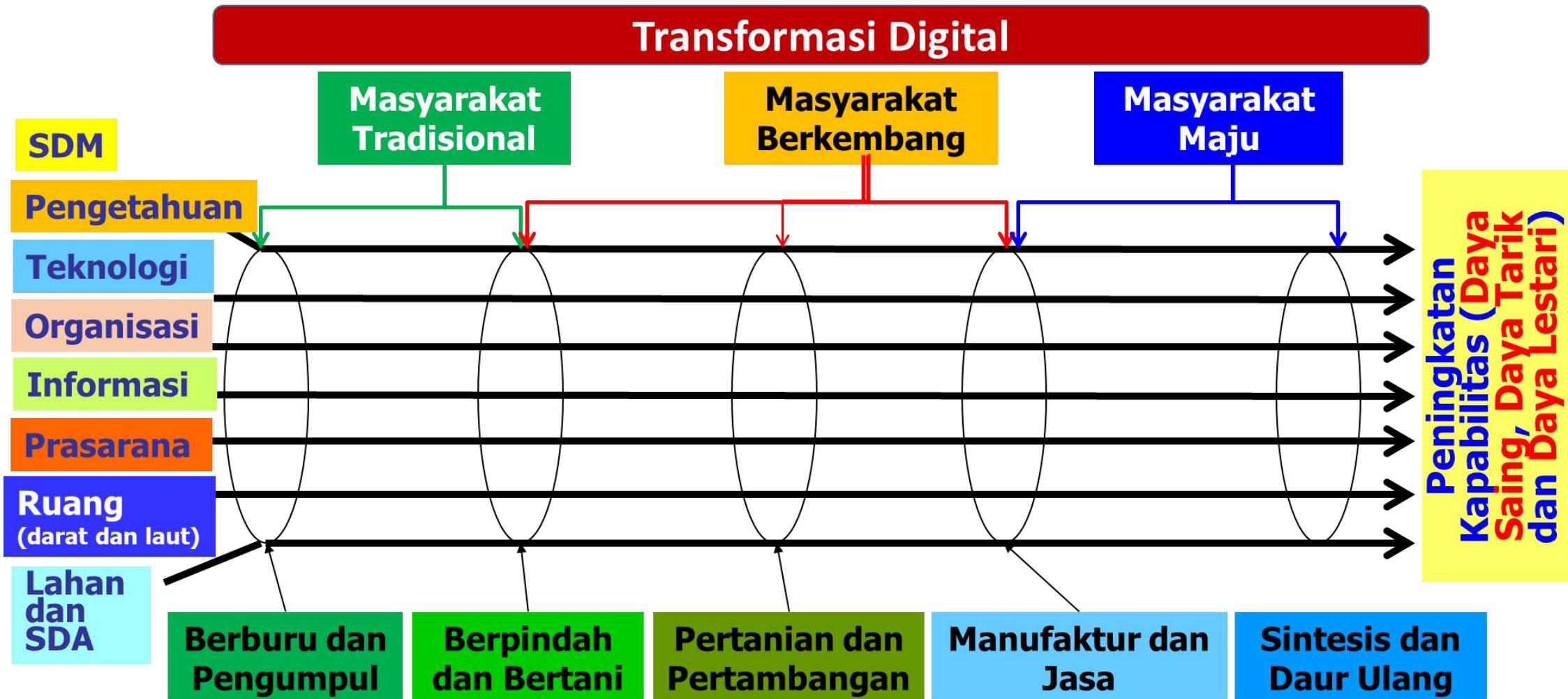
Perencanaan Berbasis Bukti dan Pengetahuan





Transformasi Sosial, Budaya dan Ekonomi:

... Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari....

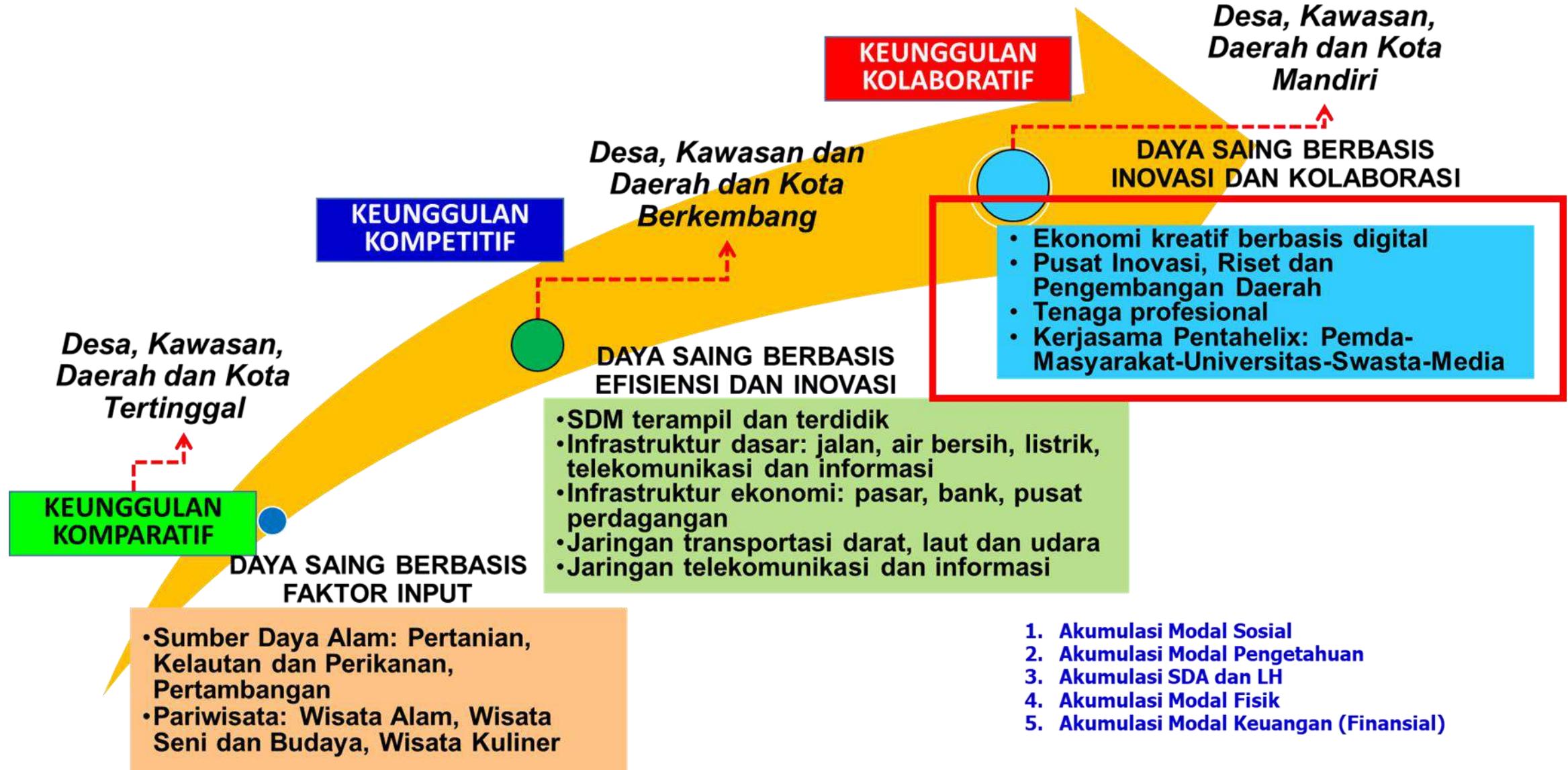


Kebijakan pembangunan harus mendorong transformasi dan akselerasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat menjadi produktif, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat.



Transformasi Desa, Daerah, Kota dan Kawasan:

... Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif....



1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi SDA dan LH
4. Akumulasi Modal Fisik
5. Akumulasi Modal Keuangan (Finansial)



Paradigma Pembangunan Berkelanjutan:

... Build Back Better, More Safer dan Sustainable ...

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

**PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN,
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF**



**Pertumbuhan
Ekonomi**



**Kesejahteraan
Masyarakat**



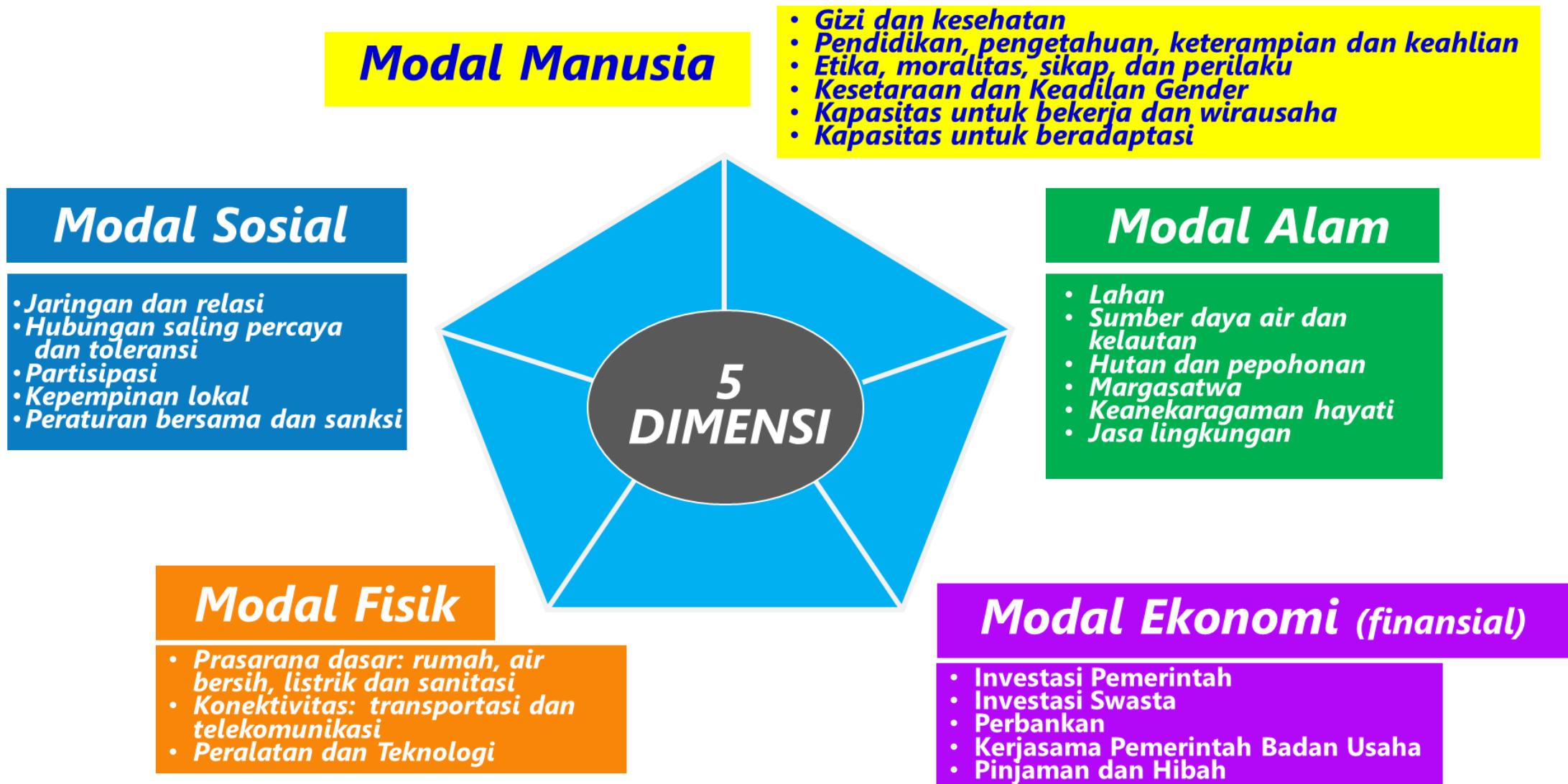
**Kelestarian
Lingkungan**

Pembangunan wilayah berbasis pengelolaan sumber daya berkelanjutan, penataan ruang yang terpadu, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan pariwisata, infrastruktur konektivitas, dan perluasan kerjasama dan kolaboasi yang adil dan berkelanjutan.



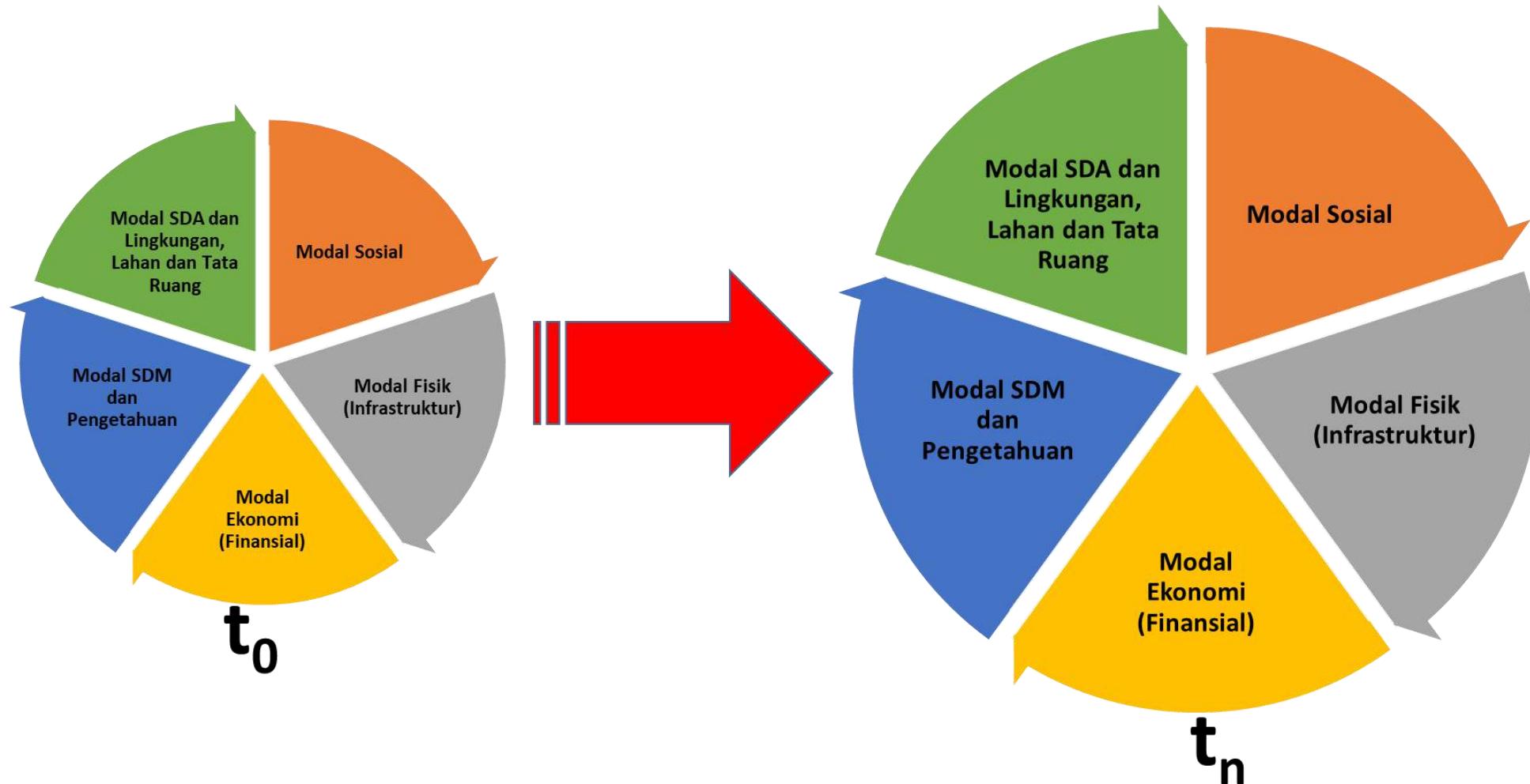


Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan (*sustainable livelihood*)





Pembangunan sebagai Proses Akumulasi yang Berkeadilan dan Berkelaanjutan

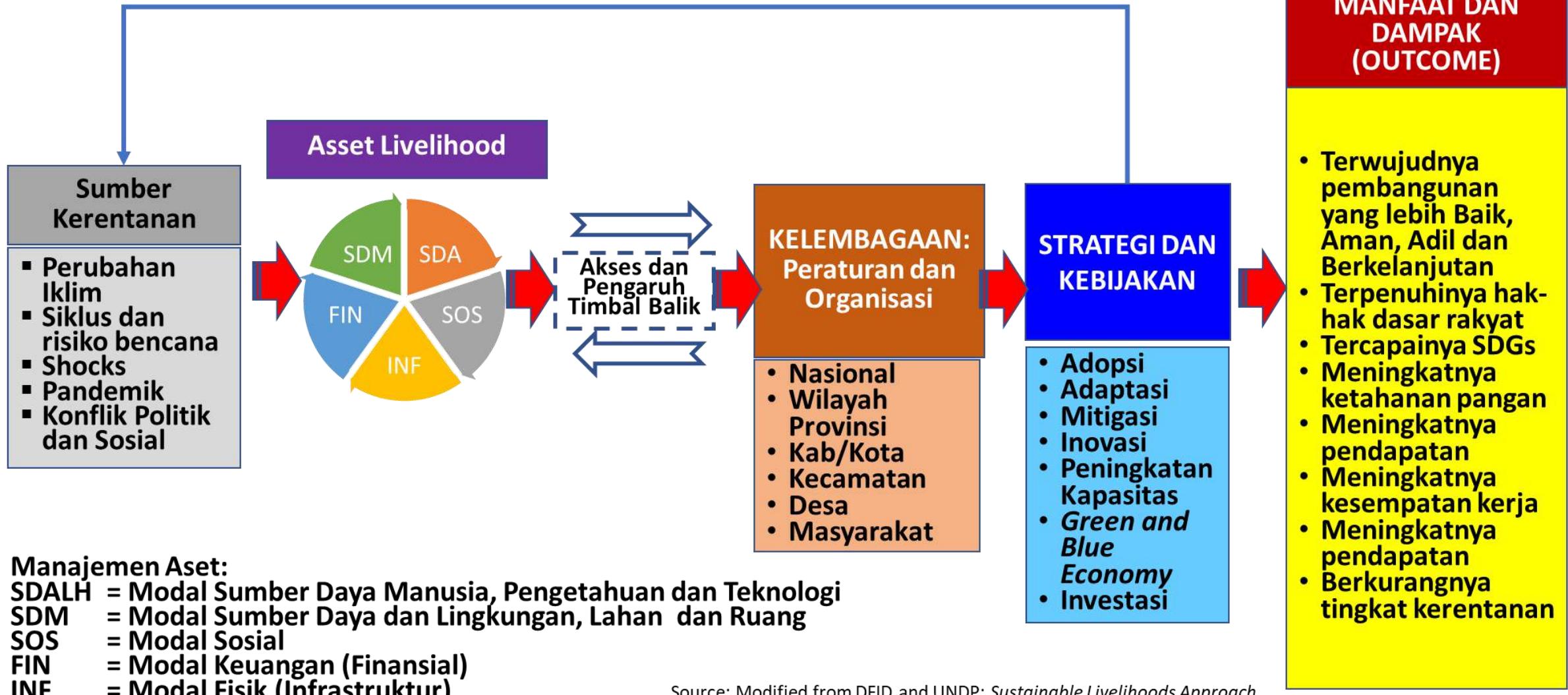


Eksplorasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan modal fisik, tapi akan merusak modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, dan melemahkan modal sosial.



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan: *Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan*





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Produksi

...Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Distribusi-Logistik-Pasar...



Komoditas Unggulan:

- Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll
- Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll
- Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dll
- Industri: IRT, Industri Pengolahan
- Pertambangan: migas dan non migas

Tugas dan Peran Bappenas, KL dan Bappeda:

1. Memetakan rantai nilai (value chain) setiap kawasan
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Pariwisata

...Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinasi-Amenitas-Pasar...

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Tabungan dan Investasi

Transformasi Digital

1. Satu Data Satu Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta Risiko Bencana
5. Kajian Neraca Air
6. Kajian dan Peta Sosial Budaya

Rencana Wisata

1. Pusat Data, Peta, Informasi dan Pengetahuan (Knowledge Management) Pariwisata
2. Pusat Promosi dan Kerjasama

1. **Intermoda**
2. **Angkutan Darat**
3. **Bandara dan Angkutan Udara**
4. **Pelabuhan dan Angkutan Laut**

Transportasi

1. UMKM dan Koperasi
- 2. Swasta**
3. Kemendag
4. KemenPUPR
5. BUMN
6. BUMD
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas PU
10. Dinas Perdagangan

1. Hotel dan Motel
- 2. Air Bersih**
3. Listrik
4. Internet
5. Tenaga Terdidik dan Terlatih

Akomodasi

1. UMKM dan Koperasi
- 2. Swasta**
3. Kemenpar
4. Kemen BUMN
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas ESDM
7. Dinas PU
8. Dinas Kominfo

1. Wisata Alam
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Olah Raga

Destinasi dan Atraksi

1. Pemerintah Desa
2. UMKM dan koperasi
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

1. Festival Seni dan Budaya
2. Festival Keagamaan
3. Festival Kuliner
4. Atraksi Wisata
5. Kompetisi Olah Raga

Amenitas: Kuliner dan Hiburan

1. Pemerintah Desa
2. UMKM dan koperasi
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

1. Industri Kerajinan, RT, Makanan dan Minuman
2. Pasar dan Pusat Perdagangan (**market Place**)

Pasar dan Pusat Perbelanjaan

1. UMKM dan Koperasi
2. Pelaku Usaha
3. Dinas Perindag
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan
6. Kemendag
7. Bea Cukai
8. BUMN

Domestik

Transportasi

Internasional

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Tabungan dan Investasi

Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:

1. Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.

Pariwisata Unggulan:

1. Wisata Alam
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Sejarah
7. Wisata Olah Raga



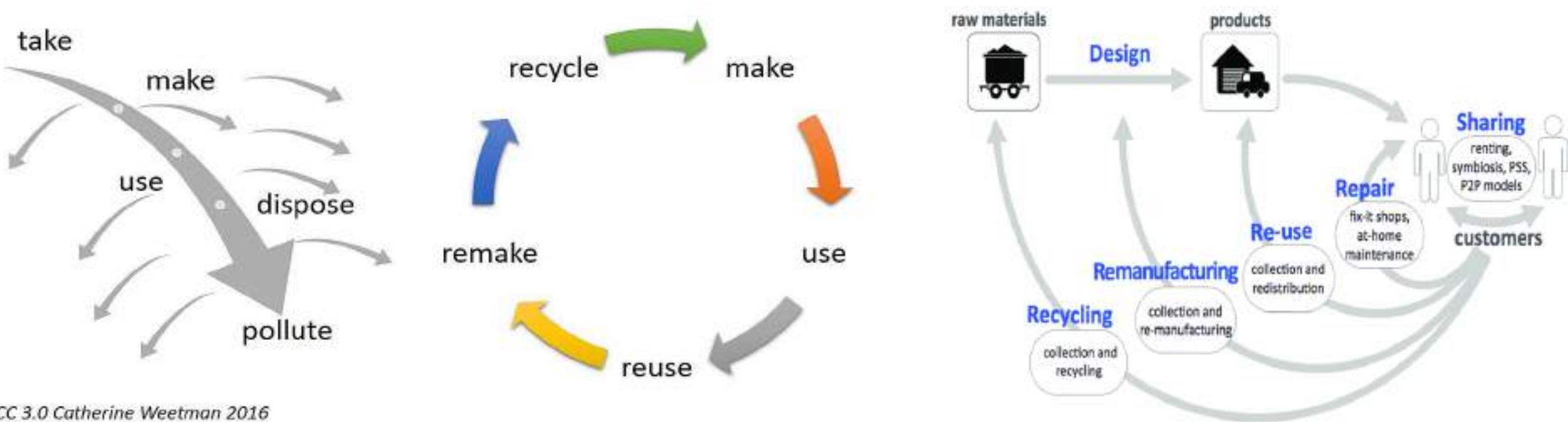


Pembangunan Berkelanjutan

...Transformasi Ekonomi Liner menjadi Ekonomi Sirkular ...

Mendorong pembangunan berbasis *circular economy* untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa mengorbankan keberadaaan lingkungan hidup sehingga kelestarian alam terjaga dan pembangunan akan keberlanjutan.

Transformasi dari “linear economy” (sebelah kiri) yang penuh kebocoran dan mengandalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk me-recycle limbah/sampah secara alami...
ke arah rantai pasok “circular economy” yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang berbasis inovasi dan teknologi.

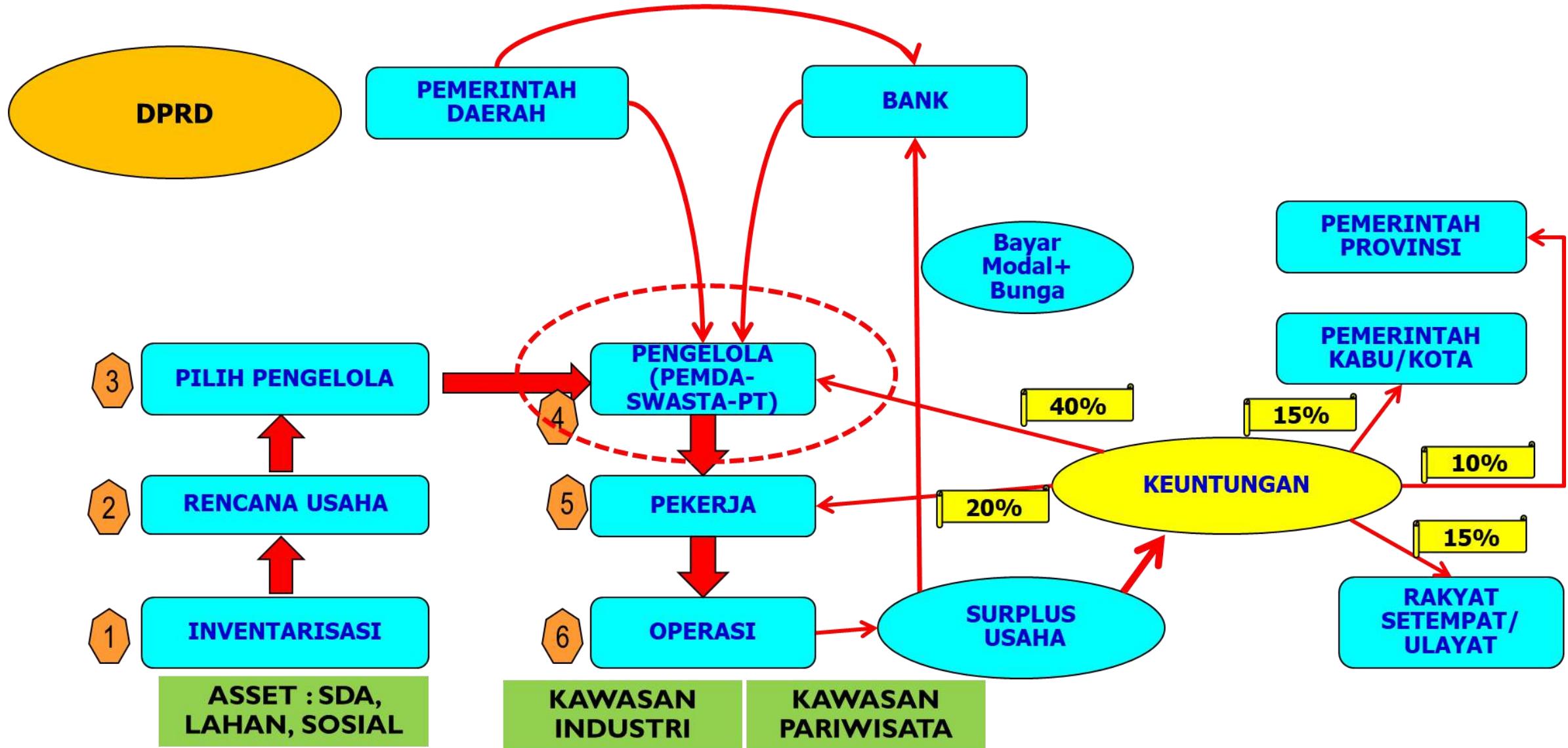


CC 3.0 Catherine Weetman 2016

Konsep “circular economy” harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau berbasis industri pengolahan dengan menjaga daya dukung lingkungan dan daya tampung wilayah.



Pengembangan Kawasan Berbasis Kemitraan (People-Public-Private Partnership)





Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

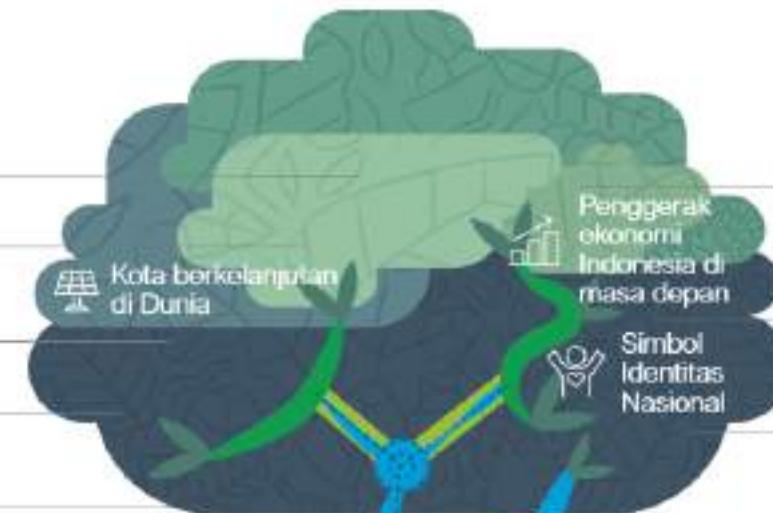
'Kota Dunia untuk Semua' dengan tujuan untuk membangun:

- Simbol identitas nasional
- Kota berkelanjutan di dunia
- Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

Agenda global dan nasional sebagai pertimbangan Visi IKN

- Visi Indonesia 2045;
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Agenda Baru Kota;
- Kebijakan Perkotaan Nasional 2045.

- Aman dan terjangkau
- Selaras dengan Alam
- Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses
- Sirkuler dan Tangguh
- Pembangunan IKN yang rendah emisi karbon



Peluang ekonomi tangguh untuk semua

Nyaman dan efisien melalui teknologi dan inovasi

Keindahan Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika

KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

PEMAMPU



Kerjasama
Pemerintah dan
Badan Usaha
(KPBU)

Kolaborasi tri-kota

Sektor prioritas
masa depan



Otonomi IKN
Pemerintahan
efektif dan efisien

Kota layak
 huni

PEMAMPU





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN



Tahapan pembangunan dibagi menjadi 5 tahap:

- Tahap 1 (2022-2024)
- Tahap 2 (2025-2029)
- Tahap 3 (2030-2034)
- Tahap 4 (2035-2039)
- Tahap 5 (2040-2045)



Fokus dalam **penahapan pembangunan** meliputi:

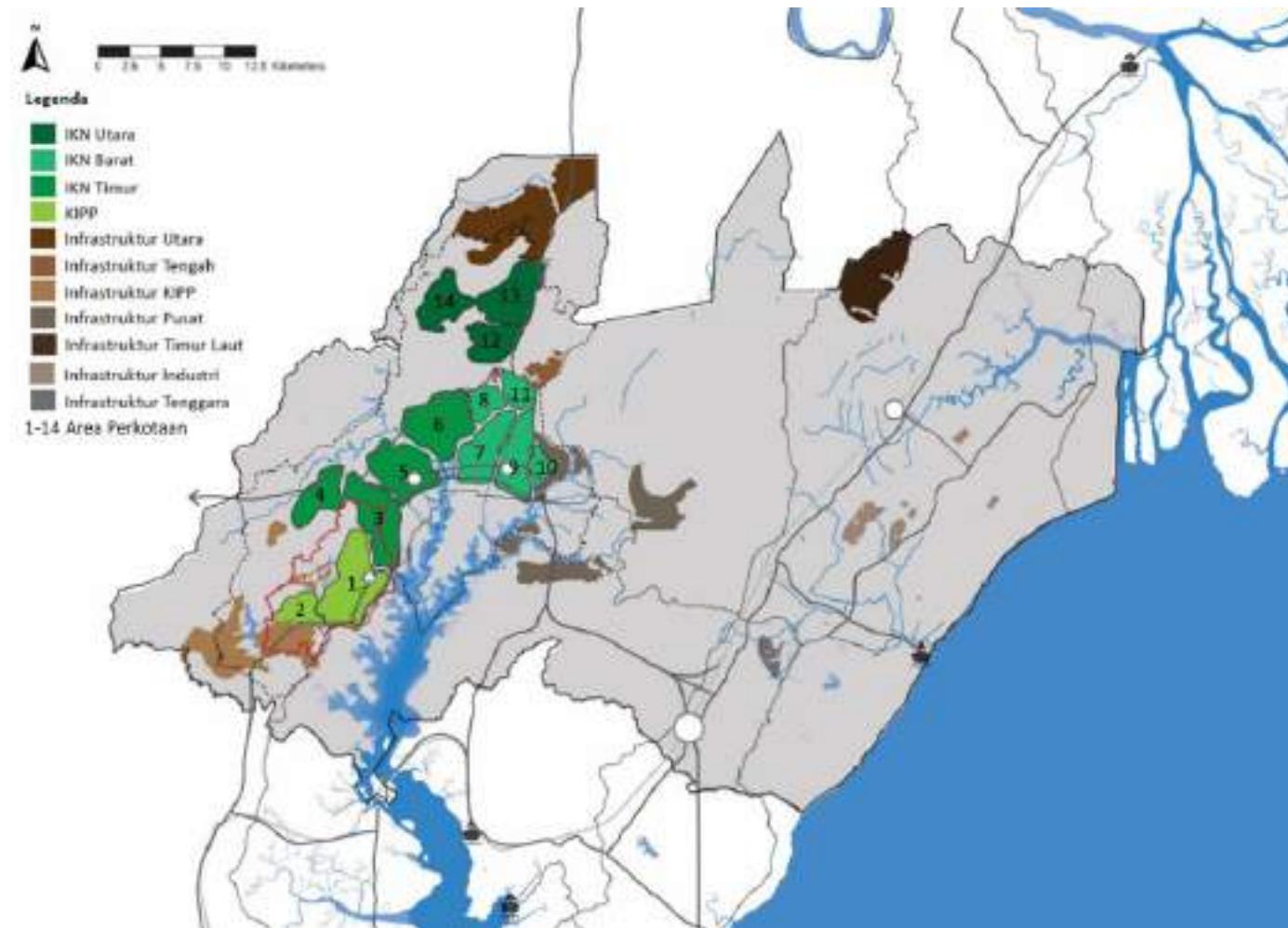
- Tahap Persiapan
- Tahap pembangunan
 1. Pembangunan Sosial
 2. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan
 3. Pembangunan industry dan pusat ekonomi
 4. Pembangunan pertahanan dan keamanan
 5. Pemindahan ASN, TNI/Polri, PNA/OI



Penahapan ini juga menjelaskan perwujudan pemanfaatan ruang yang mengindikasikan **pengembangan Kawasan** mulai dari KIPP, Kawasan IKN Timur, Kawasan IKN Barat, hingga Kawasan IKN Utara.



Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk 6 klaster dan 2 pemampu (*enabler*)





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rincian Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN

ASPEK	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2024-2029)	TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan kelembagaan otorita Pengadaan tanah Sosialisasi pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah Sosialisasi pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah Sosialisasi pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah Sosialisasi pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah Sosialisasi pihak terkait
Pembangunan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan; pembangunan fasilitas umum, pelibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan; dan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal & pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia. 			<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan; Peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia. 	
Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur transportasi, persampahan, air minum, drainase, TIK, listrik, fasum-fasos, perumahan Konservasi hutan & satwa 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan infrastruktur mobilitas (tol, bandara, dll) Pusat data terpadu Penambahan amenitas kota Program kota hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem transit dan angkutan umum basis jalan dan rel Penambahan amenitas digital 	<ul style="list-style-type: none"> KA trans Kalimantan dan KA perkotaan Kajian bendungan multiguna 	Penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi telah mencapai tahap akhir
Pembangunan industri dan pusat ekonomi	Berpusat pada upaya untuk memikat pelaku industri pelopor (<i>anchor tenant</i>) dan SDM	Pengembangan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu	Peningkatan investasi, kapasitas, diversifikasi, dan penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu	Peningkatan kapasitas, diversifikasi, penguatan 6 klaster industry dan 2 klaster pemampu	Penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu
Pembangunan pertahanan dan keamanan	pemenuhan 15-20% pembangunan simbol dan sistem hankam di KIPP dan sebagian KIKN/wilayah IKN secara penuh	Pengembangan sistem pertahanan & sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)	Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)	Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)	Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)
Pemindahan ASN, TNI, Polri, PNA, dan OI	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan ASN (sudah termasuk TNI/Polri) Persiapan transisi PNA/OI 	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan ASN Pemindahan TNI/Polri Transisi pelayanan PNA/OI 	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan ASN selesai Pemindahan TNI/Polri Pelayanan PNA/OI beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan TNI/Polri Digitalisasi dan integrasi pelayanan PNA/OI 	<ul style="list-style-type: none"> Pemindahan TNI/Polri Optimalisasi pelayanan publik PNA/OI



Prinsip dan Indikator Kinerja IKN

1. Selaras Dengan Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler dan Tangguh	6. Aman dan Terjangkau	7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua

<p>>75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi makanan)</p> <p>1.1 100% integrasi seluruh penduduk</p> <p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian</p>	<p>2.1 100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p>2.2 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif</p>	<p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030</p>	<p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara</p> <p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p>4.3 Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha</p>	<p>5.1 >10% dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p>5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p> <p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p>	<p>6.1 Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045</p> <p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p> <p>6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.</p>	<p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB</p> <p>7.2 100% konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p>7.3 >75% kepuasan dunia usaha atas layanan digital</p>	<p>8.1 0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035</p> <p>8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi</p> <p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan IKN

Forest City/Kota Hutan IKN

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/RTH, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam

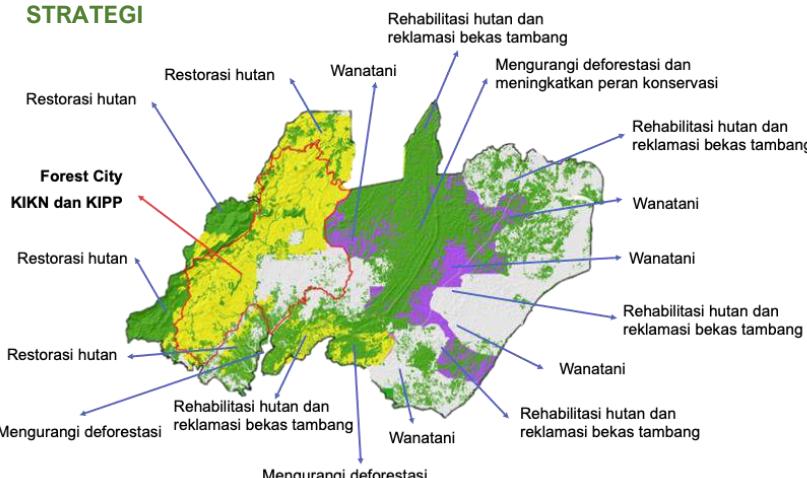
PRINSIP



75% Kawasan hijau Wilayah IKN (65% hutan & 10% tutupan hijau)

50% kawasan hijau KIKN & KIPP

STRATEGI



Sponge City/Kota Spons IKN

- Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer



Kota Nusantara (Archipelago City)

Ruang terbuka hijau & biru menjadi fondasi struktur pembentuk kota. Kedua ruang tersebut menghubungkan kota dengan alam, terintegrasi dengan desain kota untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Kota Berdaya Serap (Absorbent City)

Ruang terbuka hijau & biru pada skala kecamatan akan menangkap limpasan hujan yang dialirkan ke taman kota, sehingga akuifer terisi kembali & siklus air terjaga.

Kota Terintegrasi (Integrated City)

Elemen di skala kelurahan diintegrasikan untuk memperlambat & menahan aliran air, memanen air hujan, & meningkatkan penyerapan air hujan ke tanah.

Smart City/Kota Cerdas IKN

Komponen kota cerdas mengidentifikasi elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan.

6 Kategori inisiatif kota cerdas IKN





Ibu Kota Nusantara mendorong percepatan pertumbuhan melalui 6 Klaster Ekonomi dan 2 Klaster Pendukung

6 Klaster Ekonomi



Industri Teknologi Bersih

Greenfield baru untuk mobilitas dan utilitas yang lebih bersih



Farmasi Terintegrasi

Hub manufaktur farmasi terbaik untuk produk API *generic* serta biosimilar bernilai tinggi



Industri pertanian berkelanjutan

Industri pertanian nabati dan inovasi pangan untuk masa depan yang berkelanjutan dan resilien



Ekowisata dan pariwisata kebugaran

Ekowisata yang menyeimbangkan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial secara beragam dan inklusif



Bahan kimia dan produk kimia

Pengembangan sektor eksisting yang terintegrasi untuk menyediakan bahan baku industri masa depan



Energi rendah karbon

Transformasi sektor energi konvensional dengan melibatkan teknologi berkelanjutan dan inovasi dekarbonisasi

2 Klaster Pendukung



Smart city dan pusat industri 4.0

Kota yang terhubung untuk layak huni dan siap menghadapi masa depan



Pendidikan Abad 21

Klaster pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21 untuk memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja

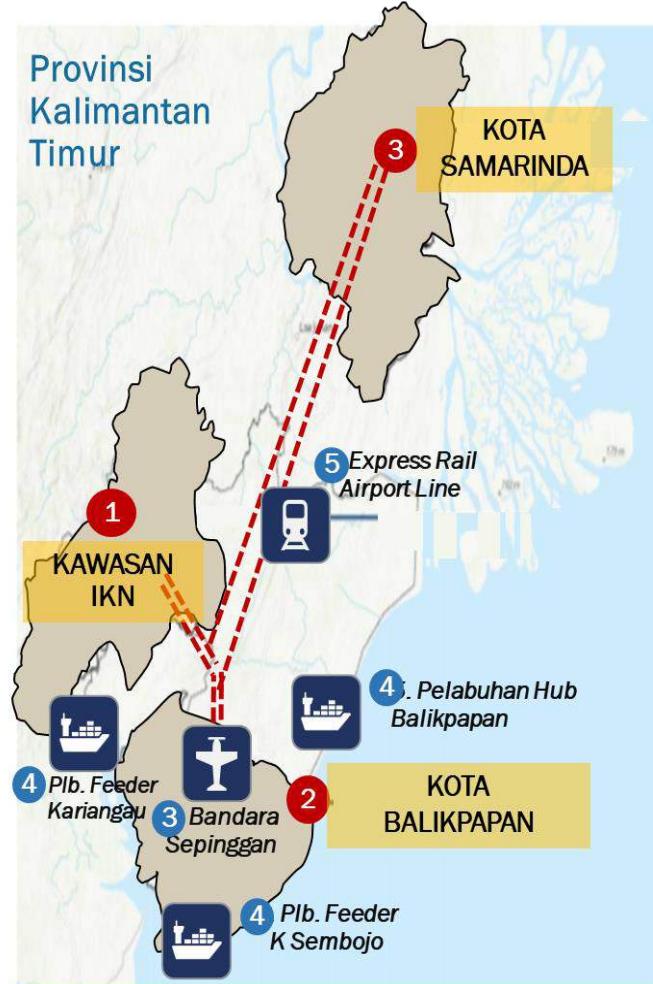


BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan IKN sebagai Superhub

Superhub Ibu Kota Negara (IKN): Ibu Kota Negara adalah Superhub dengan ekonomi kluster berbasis jasa pemerintahan, yang menghubungkan tiga klaster ekonomi dengan hub bandara dan hub Pelabuhan.

Kawasan Ibu Kota Negara dan Kota Penyangga



Ketiga Pilar Ekonomi Superhub : Integrasi Tiga Kota

Tiga Economic Hub

1



Kawasan Pemerintahan & Industri Berbasis Inovasi

Pembangunan bangunan fungsi utama pemerintahan (gedung eksekutif, legislatif, yudikatif) serta kawasan industri berbasis inovasi (*low carbon tech, farmasi dan agro-industry*)

2



Kota Samarinda

Pembangunan Samarinda sebagai pusat pertambangan berkelanjutan, energi terbarukan, dan pariwisata (ekowisata, wisata kebugaran dan bisnis)

3



Kota Balikpapan

Pembangunan Baikpapan sebagai pusat industri petrokimia, logistik dan pariwisata (ekowisata, wisata kebugaran dan bisnis)

Connectivity Backbone : Airport and Intra-city

3



Bandara Balikpapan

Titik penghubung wilayah IKN dengan provinsi atau pulau lain di Indonesia dan konektivitas (*gateway*) dengan negara luar.

4



Pelabuhan Balikpapan

Pengembangan Pelabuhan Balikpapan sebagai hub, didukung dengan pengembangan pelabuhan *feeder/pengumpulan* seperti Kariangau dan K.Sembojo

5



Express Rail Airport Line

Pembangunan konektivitas kereta ekspres yang menghubungkan IKN dengan dua kota penyangganya



Keterkaitan Antarwilayah IKN dan Daerah Mitra



1. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
2. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan secara keseluruhan.
3. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Sumatera.
4. Keterkaitan Wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Sumatera.

IKN bertumbuh melalui kolaborasi dan sinergi dengan kawasan, kota, maupun daerah mitra sekitar yang telah berkembang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, seperti sistem perkotaan di sepanjang koridor pantai timur Pulau Kalimantan dan pantai barat Sulawesi.

1. **Logistik dan Konektivitas:** dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah IKN.
2. **Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan:** SDM terampil dan unggul untuk kawasan IKN perlu ditunjang pengembangan tenaga kerja dari kabupaten/kota sekitar.
3. **Perdagangan, Jasa, dan Industri:** IKN berpotensi melakukan pengembangan dan diversifikasi industri dengan permintaan tinggi dan membuka lapangan kerja dengan keterampilan menengah-tinggi bagi SDM industri dan masyarakat luas.
4. **Pariwisata dan ekonomi kreatif:** kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar serta badan usaha/swasta dalam hal pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif.
5. **Ketahanan Pangan:** pemenuhan akses pangan di IKN ditunjang dengan keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN dengan kabupaten/kota sekitar.
6. **Energi:** potensi transformasi industri minyak dan gas bumi (migas) serta batubara menuju energi rendah karbon di daerah mitra IKN.
7. **Keberlanjutan lingkungan:** ekosistem sekitar sebagai aspek pendukung vital keberlanjutan IKN.



Persiapan dan Kesiapan Pemerintah Daerah

Bidang

Ruang Lingkup

Kegiatan dan Output

Tata Ruang dan Pertanahan

- Penyiapan RTRW dan RDTR
- Penyiapan Lahan (*clean and clear*)

Pengembangan Wilayah dan Kawasan

- Penyiapan Rencana Induk
- Penyiapan *Urban Design*

Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

- Penyiapan KLHS
- Penyiapan Kajian Risiko Bencana

Infrastruktur

- Penyiapan Infrastruktur Dasar
- Penyiapan Jaringan Transportasi
- Penyiapan Perumahan dan Permukiman

Tata Kelola dan Pengorganisasian

- Penyiapan Kerjasama dengan OIKN
- Penyiapan Tata Kelola

Pengembangan Ekonomi

- Penyiapan Prioritas Sektor
- Penyiapan *Superhub*

Aparatur (ASN, TNI dan POLRI)

- Penyiapan Optimalisasi ASN Pemda
- Pengembangan Kapasitas

Sosial, Budaya dan Kependudukan

- Penyiapan Kajian Dampak Sosial
- Penyiapan SDM Lokal

Pertahanan dan Keamanan

- Penataan Ketertiban
- Penataan Keamanan

Pembangunan

- Penyiapan Rencana Investasi
- Penyiapan Sumber Pembangunan

Kegiatan dan Output

- Revisi RTRW dan RDTR
- Pembebasan Lahan (*clean and clear*)
- Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria

- Penyiapan Masukan Pemda thd Rencana Induk
- Penyiapan Kawasan Kecamatan Lokasi IKN
- Penyiapan Kawasan Bisnis Pendukung IKN

- Penyiapan KLHS Kabupaten/Kota
- Penyiapan Kajian dan Peta Risiko Bencana
- Penyiapan Ketangguhan dan Ketahanan Bencana

- Pembangunan Infrastruktur Dasar
- Pembangunan Jaringan Transportasi
- Penmbangunan Perumahan dan Permukiman

- Penegasan Pembagian Tugas dan Peran Pemda
- Pola Kerja Pemda dan Badan Pengelola
- Pola Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil yang Adil

- Pengembangan Industri Unggulan
- Pengembangan Jasa Unggulan
- Penguatan Rantai Nilai Ekonomi

- Optimalisasi ASN Pemda dalam Pelayanan IKN
- Peningkatan Kapasitas ASN Pemda
- Penyiapan Tunjangan dan Insentif

- Perluaan Kesempatan Penduduk
- Peningkatan Keterampilan Penduduk
- Pengembangan Manajemen Konflik Sosial

- Penjaminan Perlindungan Penduduk
- Penyiapan Skema Kerjasama TNI/Polri dan Pemda

- Penghitungan Rencana Investasi
- Pengembangan Skema KPB
- Pengembangan Skema Lain seperti CSR



**Kecamatan sebagai
Pusat Pelayanan dan
Pengembangan**



Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar

Pusat Pelayanan Dasar





Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Pemberdayaan Masyarakat





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar

Pusat Inovasi dan Kewirausahaan





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan





Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis





Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Bappenas
- Kemenko
- K/L
- Kemendagri
- Pemda

- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L
- Kemenko
- Kemendagri
- DPR dan DPD

1

LKPP

2

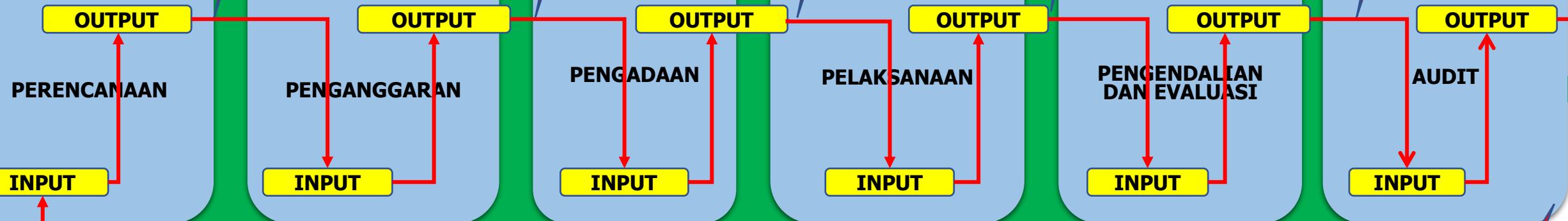
- K/L
- Pemda

3

- Kemendagri
- Kemenkeu
- Bappenas
- Kemenpan
- KSP

4

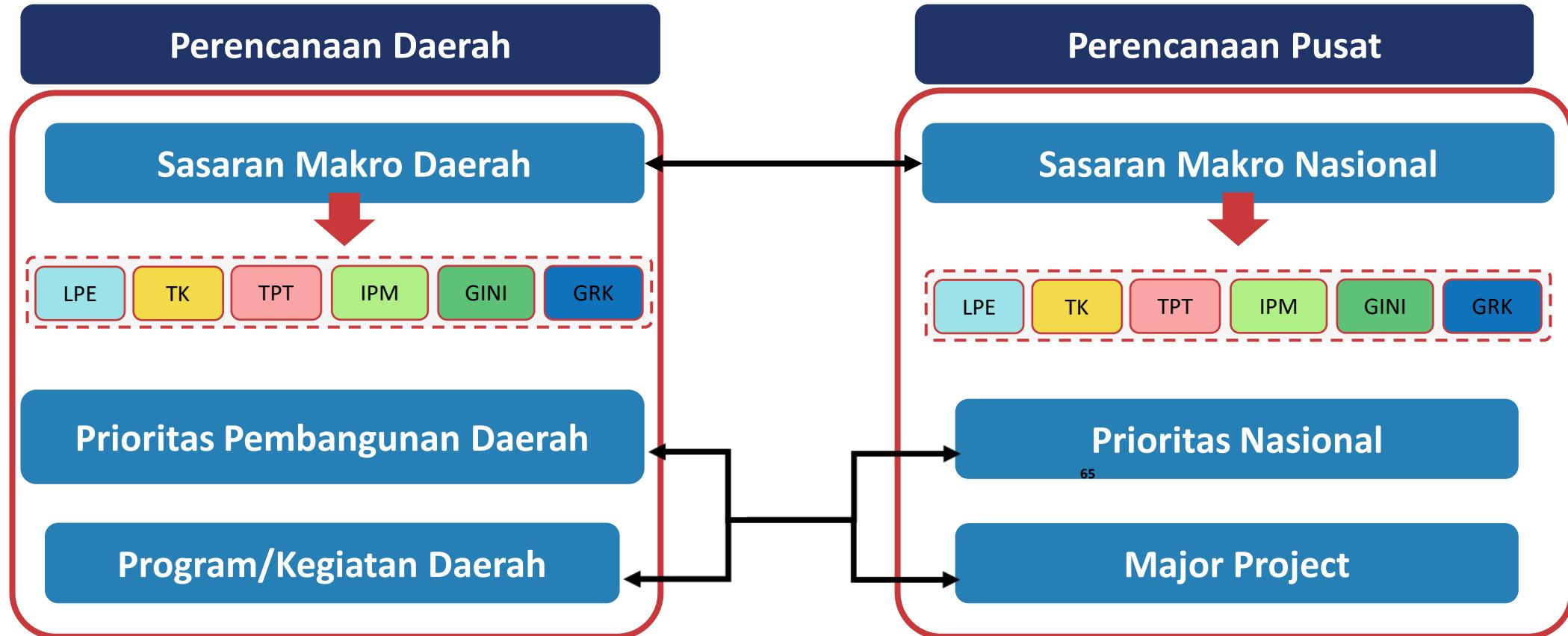
BPKP
BPK



1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
 2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga
 3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka Lelang Manual vs *E-Procurement*
 4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan
 5. Keterkaitan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)
 6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja Audit Administrasi vs Audit Subtansi
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (*fragmented*) sub sistem vs *Terpadu* (*integrated*))



Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

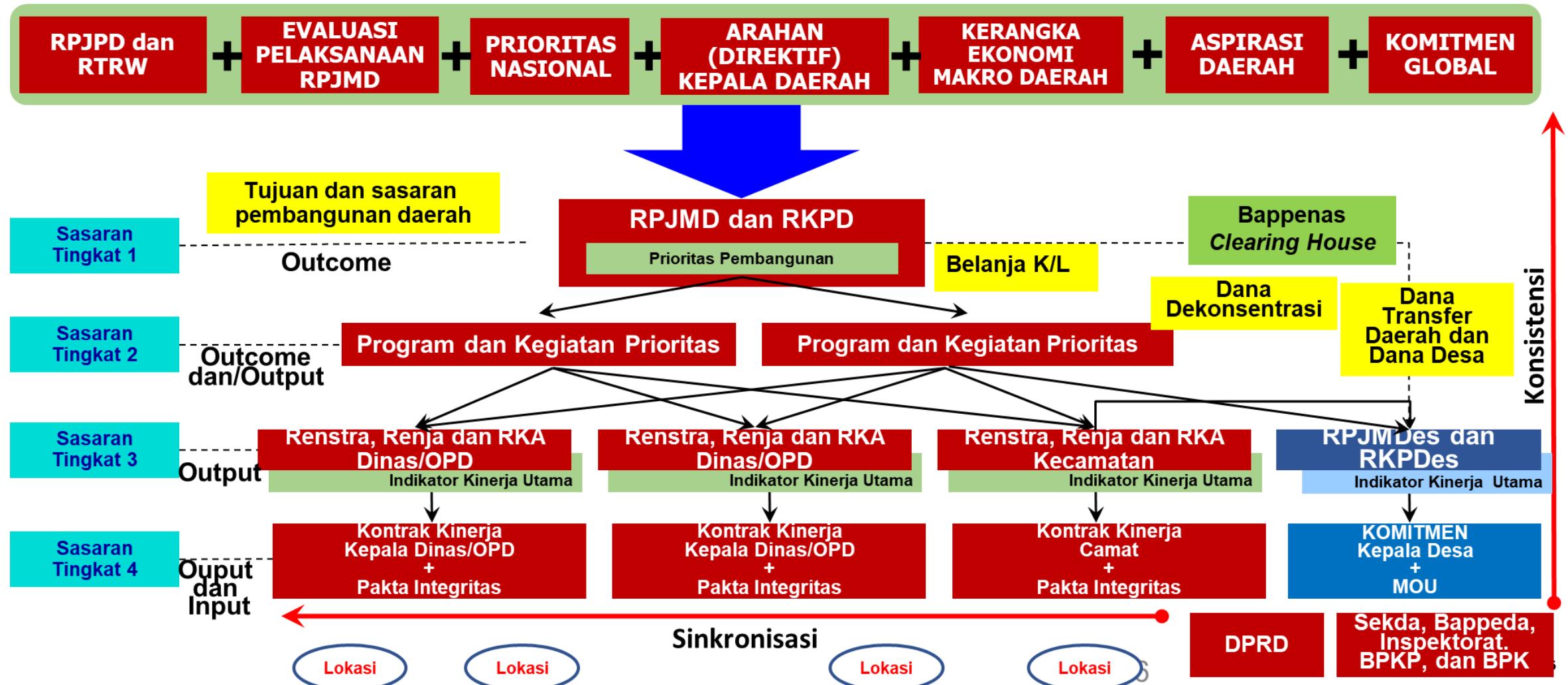


Keterangan:

LPE	Laju Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TK	Tingkat Kemiskinan	GINI	Rasio Gini
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	GRK	Emisi Gas Rumah Kaca

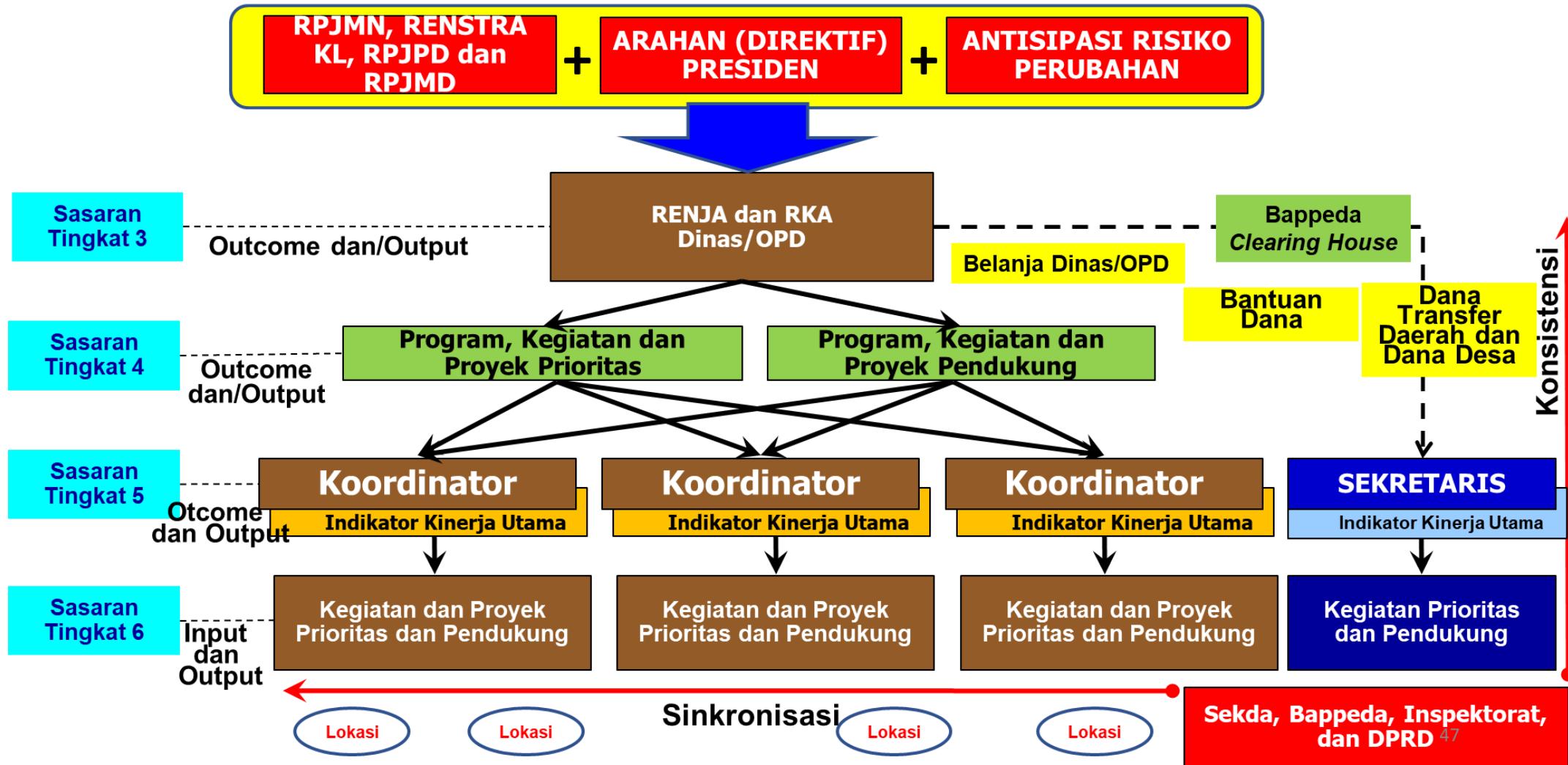


Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah





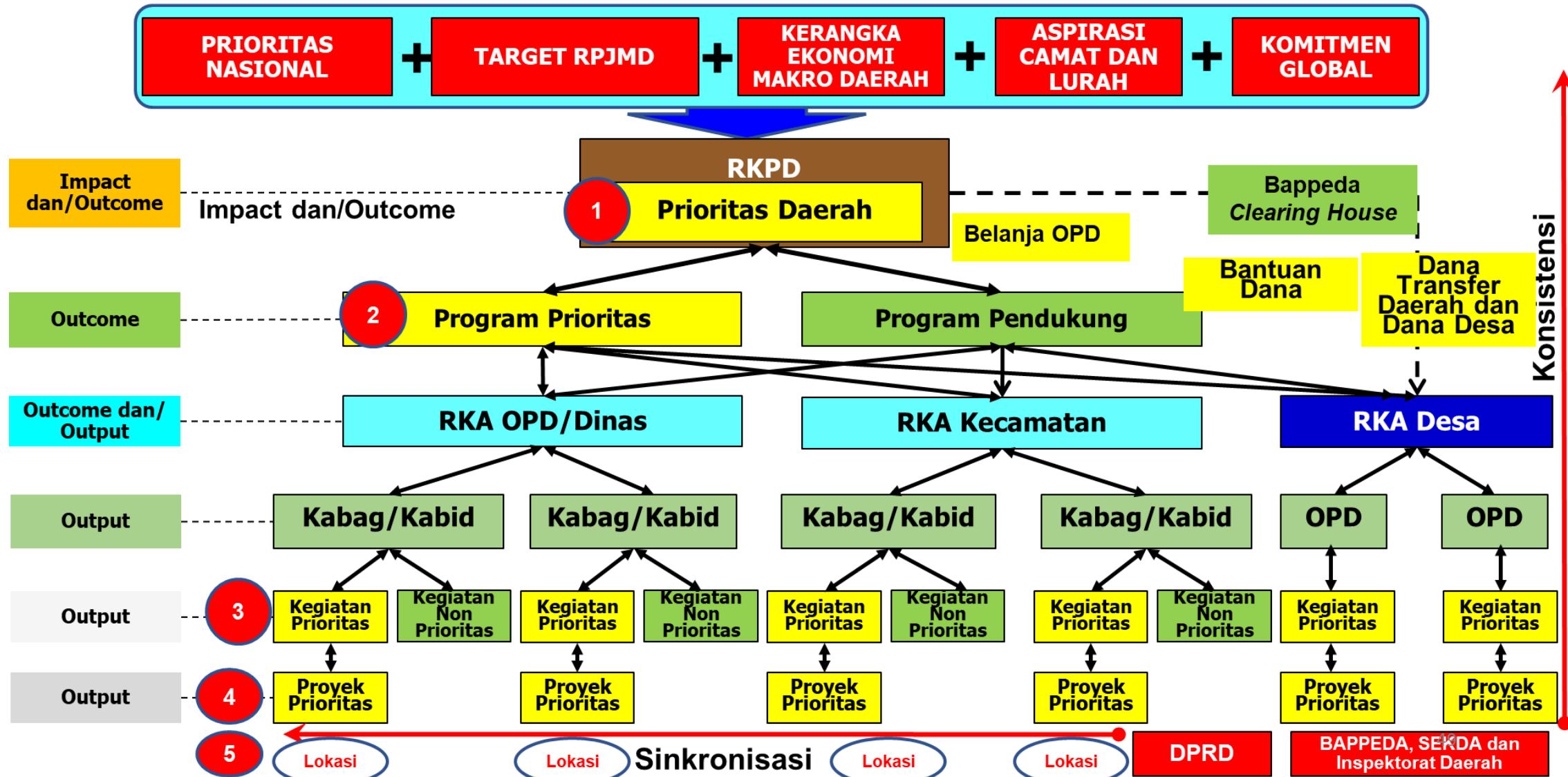
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah





BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah





**Kerjasama, Kemitraan
dan Kolaborasi
Multipihak**



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan



KOMPARATIF

Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, aman dan berkelanjutan

Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga kerja terdidik, tangguh dan sadar bencana.

Kondisi ketertiban dan keamanan daerah yang stabil dan terjaga dengan baik.



Infrastruktur: jalan, pelabuhan, bandar udara, listrik, air bersih, dan jaringan transportasi yang modern dan tertata, infrastruktur kebencanaan yang siap.



KOMPETITIF



Produksi dan jasa berstandar internasional

Iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung



Pelaku bisnis yang bermutu tinggi dengan semangat kewirausahaan, profesional, disiplin dan etos kerja kuat; memiliki kemampuan manajerial dan jaringan luas.

KOLABORATIF



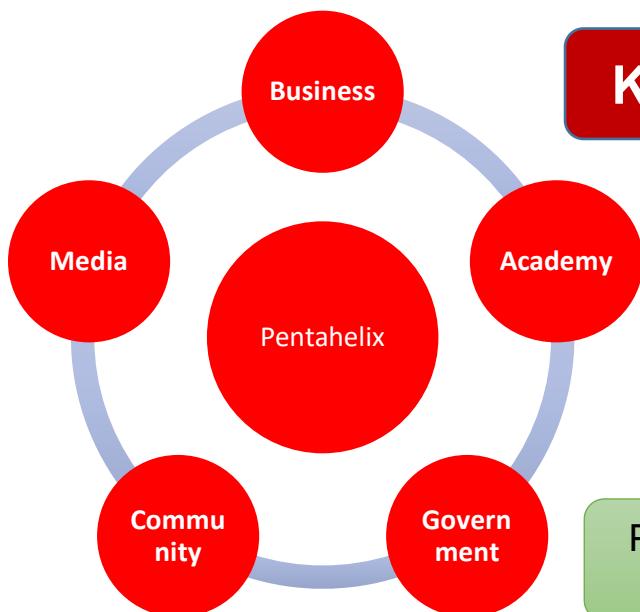
Kerjasama dan kemitraan Pemerintah, Pemda, Pelaku usaha, Perguruan tinggi, Masyarakat dan Media dalam riset dan pengembangan teknologi dan inovasi unggulan

Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan konsisten.

Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel

Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas, konsisten, terukur dan berkesinambungan

Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan perdagangan internasional yang kuat





Kerjasama dan Kemitraan Peningkatan Kinerja Pembangunan





Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah

1. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdagangan
2. Pengembangan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
3. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas
4. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

1. Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
2. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan
3. Penguatan Manajemen Pengetahuan
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan dan Swasta

1. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM
2. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
3. Perluasan Promosi dan Pemasaran
4. Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Transformasi Digital

Kerjasama Pemerintah Daerah, Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan

1. Pengembangan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
3. Pendampingan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Proyek Rintisan (*pilot project*)

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

1. Pemantauan Kinerja Pembangunan
2. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
3. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengetahuan
4. Pengawasan (*Watchdog*) dan Masukan (*Feedback*)

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Luar Negeri

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan (*knowledge sharing*)
2. Alih Teknologi dan Peralatan
3. Perluasan Perdagangan dan Investasi
4. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan



Terima Kasih.